

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.). 2006. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).
- Amirullah, Amirullah. 2013. *Tindak Pidana Korupsi Dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2: 323–55.
- Anjari, Warih. 2020. *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*. *Jurnal MasalahMasalah Hukum* 49, no. 4.
- Anshari, and Muhammad Fajrin. 2020. *Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia)*. *Res Judicata* 3, no. 1.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1: 23–33.
- Asian Disaster Reduction Center. 2003. *Glossary on Natural Disasters 2003*.
- Astuti, Prasetyo Budi W; Pujiyono; Endah Sri. 2016. "Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4: 1–12.
- Batubara, Risva Fauzi., Arief, Barda Nawawi., & Soponyono, Eko. 2014. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Law Reform*, Vol.10, (No.1).
- Busyro Muqoddas, 2011. *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Bonitua, Yan David, Pujiyono, dan Purwoto. 2017. *Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1: 1–18.
- Chazawi, Adam. 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Coppola, D. P. 2015. *Introduction to International Disaster Management*. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatah, A, Jaya, Nyoman, S, P, Juliani, H. 2017. *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana*.
- Fitriati. 2014. *Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yustisia* 90, no. 31.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi. Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. *Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*.
- Hidayat, Rofiq. "Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19." www.hukumonline.com, 2020.
- Hikmah. & Soponyono, Eko. 2019. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1).
- Iftitahsari. 2020. *Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta.
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi tetapkan status darurat kesehatan masyarakat*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Cet I, Malang.
- Juniadi Soewartojo, 1995, *Korupsi*, Jakarta: Restu Agung.
- Katimin, Herman. 2020. *Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal SASI* 26, no. 1: 39–51.

- Karyono Karyono, Rohadin Rohadin, Devia Indriyani. 2020. Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Kwik Kian Gie. 2003, Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: Edisi Kedua.
- Leden Marpaung, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Lina, Sayekti. 2020. Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja, (ILO, 2020).
- Nurjannah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi, LP3ES dan Obor*, Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Muhammad Azhar (Et.al), 2003. *Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, penarbit PT. Alumni, Bandung.
- Muqorobin, Mohammad Khairul, dan Barda Nawawi Arief. 2020. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3: 387–98.
- Petrus Soerjowinoto, 1988, *Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi*, Semarang: Pranata. Th VIII. No.7
- Purnamasari, Deti M. (2020). Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait- penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>.
- Sudarto, 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat.
- Surahmad. 2016. Kontroversi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia. *Pusdiknas : Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional Dan Internasional* 2, no. 3.

- Syamsul Anwar (Et.al), 2006. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP). 10.
- Toule, Elsa R.M. 2013. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.3, (No.3).
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula.
- Vito Tanzi, 1994. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- WHO. 2020. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-94*. WHO.
- World Bank, 1997. *World Development Report–The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank.
- Yanto, Oksidelfa. 2017. Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1.
- Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.